



Good Governance dan Transparansi Pemerintahan Daerah: Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik

Hilalludin Hilalludin
Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia
Email: hilalluddin34@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan prinsip *good governance* menjadi salah satu tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemanfaatan teknologi informasi semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam memperkuat transparansi pemerintahan daerah serta meningkatkan akuntabilitas publik dalam kerangka implementasi *good governance*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, regulasi, dan publikasi relevan yang membahas *good governance*, transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, dan teknologi informasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan utama dari berbagai literatur yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan signifikan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat mekanisme pengawasan masyarakat, mendorong partisipasi publik, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, efektivitas pemanfaatan teknologi informasi masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan ekosistem digital yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: Good Governance, Transparansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, Akuntabilitas Publik, Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

The implementation of good governance principles has become a fundamental requirement in local government administration to establish transparent, accountable, and responsive governance systems. Along with the rapid development of digital technology, information technology has increasingly been recognized as a strategic instrument for improving governance quality and strengthening public accountability. This study aims to analyze the role of information technology in enhancing local government transparency and promoting public accountability within the framework of good governance implementation. The research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from various scholarly sources, including journal articles, books, government reports, regulations, and other relevant publications discussing good governance, government transparency, public accountability, and information technology. Data analysis was conducted using content analysis techniques to identify patterns, relationships, and key findings from the reviewed literature. The findings indicate that information technology plays a significant role in improving public information disclosure, strengthening public oversight mechanisms, encouraging citizen participation, and enhancing accountability in local government administration. However, the effectiveness of information technology utilization is still constrained by challenges such as digital infrastructure disparities, limited human resource competencies, and information security concerns. Therefore, strengthening institutional capacity and developing a sustainable digital ecosystem are essential to support the realization of transparent, accountable, and citizen-oriented local governance.

Keywords: Good Governance, Government Transparency, Information Technology, Public Accountability, Local Government.

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak publik dalam memperoleh pelayanan dan informasi pemerintahan. Perkembangan demokrasi, keterbukaan informasi, serta kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, dari yang sebelumnya bersifat tertutup dan birokratis menuju sistem pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, konsep *good governance* menjadi salah satu landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya oleh publik (Soetarto & Yuliastina, 2022).

Good governance pada dasarnya merupakan tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, penegakan hukum, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan yang sering kali ditandai oleh rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan publik, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif administrasi publik modern, keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari kemampuannya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang terbuka dan akuntabel (Suwanda & Tjenreng, 2025).

Pada tingkat pemerintahan daerah, penerapan prinsip good governance memiliki peran yang sangat penting karena pemerintah daerah merupakan institusi yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai layanan publik. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pelayanan publik juga menuntut adanya sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, berbagai tantangan masih sering ditemukan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi publik, kurang optimalnya mekanisme pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih adanya kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan good governance di tingkat daerah masih memerlukan berbagai inovasi dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan (Prawira, Panjaitan, & Paranity, 2023).

Di tengah perkembangan era digital, teknologi informasi muncul sebagai salah satu instrumen strategis yang mampu mendukung implementasi prinsip-prinsip good governance. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi digital seperti portal keterbukaan informasi publik, sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik, aplikasi pengaduan masyarakat, layanan pemerintahan elektronik (*e-government*), serta platform pelayanan publik digital telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah juga sejalan dengan perkembangan konsep *digital governance* yang menempatkan teknologi sebagai instrumen utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, berbagai proses pemerintahan yang sebelumnya bersifat tertutup dapat diakses secara lebih terbuka oleh masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan setiap aktivitas pemerintahan terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik. Dengan kata lain, teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan melalui peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Arief & Abbas, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan positif dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi e-government, kualitas layanan digital, atau tingkat adopsi teknologi dalam pemerintahan daerah. Sementara itu, kajian yang secara khusus menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat hubungan antara prinsip good governance dan akuntabilitas publik masih relatif terbatas. Padahal, di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang terbuka, pemahaman mengenai peran teknologi informasi dalam membangun akuntabilitas publik menjadi semakin penting (Rahman, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis mengenai peran teknologi informasi sebagai jembatan antara implementasi prinsip good governance dan peningkatan akuntabilitas publik pada pemerintahan daerah. Perspektif ini menjadi penting karena keberhasilan penerapan good governance tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, mudah diawasi, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas teknologi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam mendukung penerapan good governance serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik pada pemerintahan daerah. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi mampu memperkuat mekanisme keterbukaan informasi, meningkatkan pengawasan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih akuntabel. Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab mengingat transformasi digital yang sedang berlangsung tidak hanya menuntut modernisasi pelayanan publik, tetapi juga menuntut terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*literature review*) untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam

mendukung penerapan prinsip *good governance* dan meningkatkan akuntabilitas publik pada pemerintahan daerah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan (H Hilalludin & Althof, 2024). Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga pemerintah, regulasi terkait pemerintahan digital, keterbukaan informasi publik, serta berbagai publikasi yang membahas implementasi *good governance* di tingkat pemerintahan daerah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi sehingga mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai perkembangan kajian yang diteliti (Zohri & Hilalludin, 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi literatur, seleksi sumber berdasarkan kriteria penelitian, klasifikasi data sesuai tema kajian, analisis isi, serta sintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu. Fokus analisis diarahkan pada peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat mekanisme pengawasan publik, mendukung keterbukaan informasi, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Zulkarnain, Hilalludin, & Haironi, 2024). Selanjutnya, berbagai temuan yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi informasi dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (H Hilalludin, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur mengenai *good governance*, transparansi pemerintahan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi, ditemukan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pemerintahan, keterbukaan informasi berbasis elektronik, serta penggunaan platform digital dalam pengelolaan administrasi publik telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai program, kebijakan, pengelolaan anggaran, serta kinerja pemerintahan. Kondisi ini menciptakan mekanisme pengawasan publik yang lebih kuat karena masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, sistem digital juga membantu pemerintah dalam mendokumentasikan setiap proses administrasi secara sistematis sehingga memudahkan proses evaluasi dan pertanggungjawaban publik (Hilalludin Hilalludin & Badriah, 2026).

Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung *good governance* masih

menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menemukan adanya keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, keterbatasan kompetensi aparatur pemerintah, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi antarorganisasi pemerintah daerah. Tantangan tersebut menyebabkan implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas publik belum berjalan secara merata di seluruh daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hasil kajian, temuan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Temuan Utama Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik

No	Aspek Temuan	Hasil Kajian
1	Transparansi Informasi	Teknologi informasi memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan
2	Akuntabilitas Publik	Sistem digital mempermudah proses pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah
3	Partisipasi Masyarakat	Platform digital meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik
4	Efisiensi Administrasi	Digitalisasi mempercepat proses pelayanan dan pengelolaan administrasi pemerintahan
5	Pengawasan Publik	Keterbukaan data memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial yang lebih efektif
6	Kepercayaan Publik	Transparansi yang meningkat berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat
7	Tantangan Implementasi	Infrastruktur, kompetensi SDM, dan kesenjangan digital masih menjadi hambatan utama

Sumber: Hasil sintesis berbagai literatur (2026).

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar teknologi informasi dalam pemerintahan daerah terlihat pada peningkatan transparansi informasi dan akuntabilitas publik. Teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lebih terbuka mengenai aktivitas pemerintahan, sehingga memperkuat mekanisme pengawasan dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, digitalisasi administrasi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Pembahasan

Teknologi Informasi sebagai Instrumen Strategis dalam Implementasi Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai perangkat pendukung administrasi pemerintahan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital memungkinkan pemerintah daerah mengelola informasi, pelayanan, dan komunikasi publik secara lebih sistematis sehingga mampu meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Hadi & Widnyani, 2024).

Temuan ini sejalan dengan teori *Good Governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum. Dalam perspektif teori tersebut, teknologi informasi berfungsi sebagai enabler atau faktor pendorong yang memungkinkan prinsip-prinsip good governance diwujudkan secara lebih konkret dalam praktik pemerintahan. Transparansi dapat ditingkatkan melalui keterbukaan informasi digital, akuntabilitas diperkuat melalui sistem pelaporan elektronik, sedangkan partisipasi masyarakat difasilitasi melalui berbagai kanal komunikasi digital yang memungkinkan interaksi secara langsung antara pemerintah dan warga (Kristian, Nuradhawati, & Ristala, 2024).

Lebih jauh, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi digital telah menggeser paradigma pemerintahan dari model birokrasi tradisional menuju model Digital Governance yang menempatkan teknologi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam paradigma ini, kualitas tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan kapasitas kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi good governance pada era digital sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi Digital sebagai Fondasi Akuntabilitas Publik

Salah satu temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan penguatan akuntabilitas publik. Transparansi pada dasarnya merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas karena masyarakat hanya dapat melakukan pengawasan apabila memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai kebijakan, program, penggunaan anggaran, dan kinerja pemerintah (Choirunnisa, Oktaviana, Ridlo, & Rohmah, 2023). Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori *Accountability Framework* yang menjelaskan bahwa akuntabilitas publik dibangun melalui tiga elemen utama, yaitu keterbukaan informasi (*answerability*), kemampuan masyarakat melakukan pengawasan (*enforcement*), dan tanggung jawab pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, teknologi informasi memperkuat ketiga elemen tersebut dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat (H Hilalludin & Winarni, 2025).

Melalui website pemerintah daerah, portal keterbukaan informasi publik, sistem informasi keuangan daerah, serta dashboard kinerja pemerintahan, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang sebelumnya sulit diakses. Kondisi ini menciptakan ruang kontrol sosial yang lebih kuat karena setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya meningkatkan transparansi administratif, tetapi juga memperkuat mekanisme akuntabilitas demokratis yang menjadi salah satu pilar utama good governance (Kristian, Rahma, Nugraha, & Putri, 2020).

Dalam perspektif teori *Principal-Agent*, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat dipahami sebagai hubungan antara agen (*agent*) dan pemberi

mandat (*principal*). Salah satu permasalahan utama dalam hubungan tersebut adalah terjadinya *information asymmetry* atau ketimpangan informasi, di mana pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti mampu mengurangi kesenjangan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat transparansi digital yang dibangun pemerintah daerah, semakin kuat pula akuntabilitas publik yang dapat diwujudkan.

Teknologi Informasi dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai platform digital memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan, serta evaluasi kinerja pemerintah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemerintahan yang bersifat *government-centered* menuju tata kelola yang lebih *citizen-centered* (Kencono, Putri, & Handoko, 2024). Temuan ini sejalan dengan teori *Participatory Governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pemerintahan sebagai syarat terciptanya kebijakan yang demokratis dan akuntabel. Dalam perspektif teori tersebut, partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Teknologi informasi berperan sebagai media yang mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis, administratif, dan birokratis yang selama ini membatasi keterlibatan masyarakat.

Keberadaan aplikasi pengaduan masyarakat, forum konsultasi publik digital, media sosial pemerintah, serta berbagai platform pelayanan daring telah memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga dapat memperoleh umpan balik secara cepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan (Rojabi, 2025). Dalam perspektif teori *Network Governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern tidak lagi bersifat hierarkis, tetapi berkembang menjadi jaringan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, teknologi informasi dapat dipahami sebagai instrumen yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.

Tantangan Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik

Meskipun teknologi informasi memberikan berbagai manfaat dalam mendukung good governance, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur digital yang menyebabkan tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses informasi dan pelayanan publik antarwilayah.

Selain itu, keterbatasan kompetensi digital aparaturnya pemerintah dan rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi yang canggih tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkannya secara efektif. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan baru berupa ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan penyalahgunaan informasi digital (Wijaya & Saleh, 2025).

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori *Socio-Technical System* yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh aspek sosial, organisasi, budaya, dan kelembagaan yang mendukungnya. Teori ini menegaskan bahwa teknologi dan manusia merupakan dua komponen yang saling berkaitan dan harus berkembang secara seimbang. Oleh karena itu, keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung good governance tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, perubahan budaya organisasi, serta pengembangan sistem pengawasan yang efektif (Kristian et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik pada pemerintahan daerah. Namun, kontribusi tersebut hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila didukung oleh ekosistem tata kelola yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan teknologi sebagai instrumen pembangunan pemerintahan yang terbuka, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa teknologi informasi bukan tujuan akhir dari reformasi birokrasi, melainkan sarana strategis untuk mewujudkan praktik good governance yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang semakin besar bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui berbagai platform digital, akses terhadap informasi publik menjadi lebih mudah, proses pelayanan semakin efisien, dan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas publik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, dan memperkuat sistem pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, upaya pengembangan pemerintahan digital perlu diarahkan tidak hanya pada

penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan kolaborasi. Dengan demikian, teknologi informasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan prinsip *good governance* dengan praktik pemerintahan yang lebih akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian literatur (systematic literature review):

Kendala penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). *PROtek:*

Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 8(1), 1–6.

Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem

Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas

Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan*

Sosial, 3(1), 71–95.

Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis:

Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 6(02), 639–658.

Hilalludin, H. (2025). *Upaya Guru PAI dalam Membentuk Self Control Siswa Kelas XII*

Salafiyah Ulya ICBB Tahun Ajaran 2024/2025. STIT Madani Yogyakarta.

Hilalludin, H, & Althof, G. (2024). Perbedaan Tingkat Kematangan Sosial antara Santri

Pondok Pesantren Modern dan Tradisional. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya*

Ilmiah, 2(3), 201–208.

Hilalludin, H, & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita

yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus Dusun Nganyang. *Sosial Simbiosis: Jurnal*

Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(1), 106–115.

- Hilalludin, Hilalludin, & Badriah, L. (2026). Analisis Kebijakan Kurikulum Nasional dalam Kerangka Ideologi dan Tujuan Pendidikan Nasional. *Imanu: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam*, 2(01), 75–87.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506.
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2024). Peran E-Government dalam Meningkatkan Transparansi Publik di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). *Jurnal Academia Praja*, 7(2), 252–263.
- Kristian, I., Rahma, A. F., Nugraha, B., & Putri, C. A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11–22.
- Prawira, M. G., Panjaitan, A. C. D., & Paranity, A. P. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKDI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 82–89.
- Rahman, F. (2021). Kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81–102.
- Rojabi, M. A. (2025). *Transformasi digital dalam pelayanan publik*. Afdan Rojabi Publisher.
- Soetarto, H., & Yulastina, R. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Public Corner*, 17(2), 32–44.

- Suwanda, I. G. M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 271–282.
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Zohri, M., & Hilalludin, H. (2025). Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33–44.
- Zulkarnain, M., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Siswa di Sekolah. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(3), 117–125.